



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG (RPJP) DAERAH
KABUPATEN SOLOK
2006 – 2025

TAHUN 2005

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, maka penyusunan Buku Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 – 2025 dapat diselesaikan.

Penyusunan RPJP ini untuk memenuhi ketentuan yang digariskan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana RPJP adalah rangkaian mekanisme perencanaan pembangunan di daerah yang mengacu kepada mekanisme perencanaan di tingkat Propinsi dan Nasional.

Pemerintah Kabupaten Solok mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada segenap pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Solok ini.

RPJP ini berlaku untuk masa 20 (dua puluh) tahun kedepan dan menjadi acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan lima tahunan yang melibatkan seluruh stakeholder. Akhirnya, semoga RPJP ini dapat berjalan sesuai dengan harapan kita semua dan mendapat ridho Allah SWT.

BUPATI SOLOK

dto

GUSMAL

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Maksud dan Tujuan	I-4
1.3. Landasan Hukum	I-4
1.4. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-5
1.5. Sistematika Penulisan	I-5

BAB II. KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum	II-1
2.2. Masalah dan Tantangan	II-2

BAB III. VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi	III-1
3.2. Misi	III-4
3.3. Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Solok	III-5

BAB IV. PENUTUP

IV-1

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR :
TANGGAL :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Solok dibentuk berdasarkan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah dengan Ibukota Solok. Seiring berjalannya waktu dan semakin pesatnya pertambahan penduduk, maka pada tanggal 16 Desember 1970 Kabupaten Solok dimekarkan menjadi Kotamadya Solok dan Kabupaten Solok.

Sejak tahun 1980 secara faktual pusat pemerintahan Kabupaten Solok telah berada di Koto Baru Kecamatan Kubung, namun secara yuridis Ibukota Kabupaten Solok masih berada di Solok. Selama hampir dua puluh satu tahun aktifitas pemerintahan Kabupaten Solok dijalankan dari Koto Baru. Selanjutnya untuk mendekatkan pelayanan masyarakat dan pengembangan kawasan perkantoran, mengingat terbatasnya lahan dikawasan Koto Baru, maka pada bulan Mei Tahun 2001 pusat pemerintahan Kabupaten Solok kembali berpindah ke kawasan Kayu Aro – Sukarami (Arosuka). Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro – Sukarami di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, tanggal 2 April 2005 Ibukota Kabupaten Solok secara resmi dipindahkan dari Solok ke Arosuka sebagai nama baru Ibukota Kabupaten Solok.

Dengan bergulirnya waktu dan tuntutan reformasi serta dukungan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka sebagian Kabupaten Solok juga dimekarkan menjadi Kabupaten Solok Selatan yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok disusun berdasarkan analisis internal dan eksternal yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dari sumberdaya yang dimiliki. Rencana Pembangunan Jangka Panjang ini merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan daerah sebagaimana termaktub dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yang akan digunakan untuk sebagai acuan dalam menyusun RPJM Daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dokumen ini bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah, yang disusun dengan pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh pelaku pembangunan (*stakeholder*).

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah bersifat prediktif dan memuat hal-hal yang fundamental dan krusial yang terdiri dari Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional. Oleh karena itu, dokumen perencanaan ini memberikan

keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maka Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya. Untuk itu dalam 20 (dua puluh) tahun yang akan datang, beberapa hal yang sangat fundamental dan mendesak bagi Kabupaten Solok untuk dilakukan adalah penataan kembali berbagai langkah dan strategi dalam berbagai aspek pembangunan baik pada bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan. Pada akhirnya Kabupaten Solok diharapkan mampu mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi sejajar serta memiliki daya saing yang kuat didalam pergaulan regional, nasional dan internasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2006-2025 dikembangkan dari Visi dan Misi Daerah Kabupaten Solok dan dijabarkan ke dalam Arah Pembangunan Daerah sebagai refleksi dari cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh Kabupaten Solok serta strategi untuk mencapainya. Dalam penyusunan RPJP tersebut dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai *stakeholder* yang terdiri dari masyarakat, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi adat dan keagamaan, serta unsur-unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dengan demikian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2006-2025 merupakan produk dari semua elemen daerah yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

RPJP Daerah Kabupaten Solok sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh *stakeholder* (pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha serta dunia industri) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang disepakati bersama.

1.2.2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJP Daerah Tahun 2006-2025 adalah untuk:

1. menyamakan persepsi dengan seluruh stakeholder pembangunan ;
2. menciptakan koordinasi dan sinkronisasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah dan nasional ;
3. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan ; dan
4. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.3. Landasan Hukum

Landasan idil dari RPJP Daerah Kabupaten Solok adalah Pancasila dan Landasan Konstitusionil Undang – Undang Dasar 1945, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah ; Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

1.4. Hubungan RPJP Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJP Daerah Tahun 2006-2025 Kabupaten Solok ini berkaitan dengan RPJM dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Dalam menyusun RPJP Daerah tersebut diharapkan adanya keserasian dengan rencana penggunaan dan RPJM agar perencanaan ini terimplementasi secara utuh dan berkesenambungan.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok tahun 2006-2025 disusun dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah

Bab III : Visi dan Misi dan Arah Pembangunan Daerah Tahun 2006-2025

Bab IV : Penutup

BAB II

KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1. Gambaran Umum

Kabupaten Solok terletak antara 0° 20' 14" dan 01° 46' 45" LS serta antara 100° 25' 00" dan 100° 33' 43" BT dengan luas wilayah 3.738 km². Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Solok sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar, sebelah Selatan dengan Kabupaten Solok Selatan, sebelah Barat dengan Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan serta sebelah Timur dengan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan Kota Sawahlunto. Seluruh Ibukota kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kabupaten Solok, dapat diakses langsung dengan angkutan umum kecuali untuk ke kota Painan yang harus melalui Kota Padang.

Topografi daerah bervariasi antara dataran dan berbukit-bukit dengan ketinggian 350-1.458 meter dari permukaan laut. Kabupaten Solok disamping mempunyai banyak sungai, juga memiliki empat danau yaitu Danau di Ateh, Danau di Bawah, Danau Talang dan sebahagian Danau Singkarak yang terkenal dengan keindahan alamnya.

Dilihat dari komposisi pemanfaatan lahan, sebahagian besar (45,40%) wilayah Kabupaten Solok masih berstatus hutan negara dan 10,60% berstatus hutan rakyat. Sedangkan yang diolah rakyat untuk ladang/kebun 8,30% dan dikelola perusahaan perkebunan 6,70%. Pemanfaatan lahan untuk sawah lebih kurang 4,70% dan merupakan areal sawah terbesar di Sumatera Barat.

Kabupaten solok merupakan sentra produksi padi di Provinsi Sumatera Barat, dengan areal sawah terluas berada di Kecamatan Gunung

Talang, kemudian diikuti Kecamatan Kubung dan Bukit Sundi, sedangkan Kecamatan-kecamatan lain luas areal sawah kurang dari 2000 Ha.

Di sisi lain semenjak pusat pemerintahan Kabupaten Solok dialihkan ke Arosuka jarak tempuh ke Kota Padang selaku ibu kota Propinsi semakin pendek yaitu 40 km, ke Kota Medan 825 km dan ke Banda Aceh 1.433 km. Sebaliknya terjadi penambahan jarak kalau ke Propinsi Riau 231 km, Jambi 495 km, Palembang via Muara Enim 993 km, Bengkulu 736 km serta Bandar Lampung 1.170 km.

Prediksi kondisi Kabupaten Solok untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan, semenjak pusat pemerintahan Kabupaten Solok dialihkan ke Arosuka jarak tempuh ke Kota Padang selaku ibu kota Propinsi semakin dekat. Serta perkembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi dengan tata ruang yang tertata dengan rapi, diestimasi Kabupaten Solok akan berkembang maju. Perkembangan ini tidak hanya terhadap perkembangan tata ruang yang baik akan tetapi harus diikuti dengan perubahan struktur perekonomian masyarakat, sehingga pendapatannya akan dapat meningkat. Di sisi lain dengan semakin dekatnya jarak tempuh dari Kota Padang ke Kabupaten Solok, akan menimbulkan tantangan bagi Kabupaten Solok dalam hal keamanan dan ketertiban jalan raya dan pada gilirannya hal tersebut juga akan mempengaruhi terhadap keamanan masyarakat.

2.1.2. Masalah dan Tantangan

2.1.1. Penduduk

Kondisi objektif pembangunan Kabupaten Solok dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir ini ditandai dengan adanya beberapa persoalan; antara lain masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia, masih belum optimalnya kinerja pelayanan umum, masih rendahnya kinerja lembaga politik, belum optimalnya penggalan potensi ekonomi rakyat, dan investasi. Disamping itu,

masih kurangnya infrastruktur ekonomi dan masih terjadinya pengrusakan lingkungan. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan masih rendahnya aplikasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Kesemuanya itu akan bermuara kepada rendahnya kinerja makro ekonomi regional Kabupaten Solok dan kualitas kehidupan masyarakat. Secara lebih spesifik setelah diidentifikasi ada 7 (tujuh) persoalan pembangunan di Kabupaten Solok dan seluruh persoalan tersebut dijadikan sebagai basis dalam mendesain Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok 2006 – 2025.

Jumlah penduduk Kabupaten Solok sampai tahun 2004 mencapai 341.697 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 166.341 jiwa dan perempuan mencapai 175.356 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2004 mencapai 1,51 persen. Jika data ini dibandingkan dengan luas daerah, maka diketahui rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Solok pada tahun 2004 mencapai 91 jiwa/km². Jumlah penduduk terbesar berada pada Kecamatan Kubung (15,60%), selanjutnya Lembah Gumanti sebesar 13,88% dan disusul Kecamatan Gunung Talang mencapai 12,82%.

Berdasarkan estimasi jumlah penduduk, ternyata terjadi peningkatan jumlah penduduk yang cukup signifikan. Pada tahun 2005 penduduk Kabupaten Solok berjumlah 350.433 jiwa. Berarti rerata pertumbuhan penduduk 2006-2025 sebesar 1,2% pertahun. Pertumbuhan penduduk menimbulkan implikasi langsung terhadap penyediaan sarana-prasarana pendidikan, kesehatan, sosial, olah raga, budaya maupun jasa pelayanan itu sendiri.

Berdasarkan komposisi atau kelompok penduduk berdasarkan umur, diketahui bahwa penduduk berusia 10-14 tahun merupakan jumlah terbesar yaitu mencapai 11,6 persen. Artinya pada kelompok ini penduduk tersebut masih berada pada usia sekolah (SD dan SLTP). Selanjutnya jumlah

kelompok umur 15 – 19 tahun mencapai 10,9 persen, kelompok umur dari 5 – 9 tahun mencapai 10,6 persen dan diikuti oleh kelompok umur 0 – 4 tahun sebanyak 9,8 persen. Jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja mencapai 52,14 persen atau mencapai 236.537 jiwa pada tahun 2004.

Berdasarkan pekerja, dapat dilihat bahwa sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbesar. Dari tahun 1998-2003, sektor pertanian menyerap 69,7%, sedangkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran mencapai 11,5%. Sementara sektor jasa dan industri pengolahan hanya menyerap 7,4 % dan sektor lain rata-rata di bawah 3%. Disamping itu tingkat pengangguran terbuka terus menurun dari 27% pada tahun 2003 menjadi 16,52% pada tahun 2004.

Kualitas sumber daya manusia Kabupaten Solok pada umumnya relatif masih rendah, hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator. (1) rata-rata lama sekolah penduduk relatif rendah. Pada tahun 2004 rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah baru mencapai 7,14 % Tahun. (2) rata-rata tingkat pendidikan juga relatif rendah. Proporsi penduduk berusia sepuluh tahun keatas yang berpendidikan SLTP keatas masih sekitar 41,13 %. (3) angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas masih sebesar 5,47 %. (4) angka partisipasi kasar tingkat SLTP masih 78,54 % dan angka partisipasi murni tingkat SLTP sebesar 70,03 %. Di samping itu masih terjadinya disparitas tingkat pendidikan antar kelompok masyarakat yang masih cukup tinggi, baik antara penduduk miskin dan penduduk kaya, antara penduduk laki-laki dan perempuan, maupun antara penduduk perkotaan dan Nagari serta jorong-jorong.

Relatif rendahnya kualitas pendidikan di daerah ini disebabkan berbagai faktor; antara lain: (1) belum meratanya pendidikan baik secara kuantitas maupun secara kualitas. (2) tingkat kesejahteraan pendidik yang

juga masih rendah. (3) fasilitas belajar juga belum tersedia secara memadai. (4) masih banyaknya peserta didik yang tidak memiliki buku pelajaran.

Disisi lain, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan belum sepenuhnya mendukung pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan, termasuk konstribusinya dalam penyediaan anggaran pendidikan serta belum terlaksananya Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang seharusnya diterapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan acuan umum. Disamping itu efektifitas peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah juga belum optimal.

Keterbatasan anggaran untuk pembangunan pendidikan juga masih menjadi kendala dalam peningkatan kualitas pendidikan. Pengalokasian APBD sebesar minimal 20 % sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk mendukung biaya pendidikan cenderung memberatkan APBD Kabupaten Solok. Disisi lain Partisipasi dan dukungan masyarakat yang belum optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan menjadi tantangan agar keikutsertaan masyarakat dalam pendidikan dapat dilibatkan secara penuh.

Selanjutnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat masih rendah antara lain tercermin dari angka kematian bayi sebesar 82 jiwa dari 6.678 kelahiran. Angka kematian ibu melahirkan dan balita kurang gizi sebesar 27/6.678 jiwa. Disamping itu, pola penyakit yang diderita masyarakat pada umumnya masih berupa penyakit menular dan mewabah yang kadangkala menyebabkan kejadian luar biasa seperti diare, demam berdarah dan malaria serta berbagai penyakit menular lainnya. Ketersediaan tenaga kesehatan di Kabupaten Solok relatif masih kurang hampir semua jenis tenaga kesehatan yang diperlukan. Disamping itu pembiayaan kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah juga masih terbatas yang disebabkan terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh daerah.

Persoalan penyandang cacat ditunjukkan oleh : rendahnya akses ke pelayanan sosial dasar, terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial untuk berbagai jenis kecacatan, dan rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan umum. Disisi lain masalah ketunasanusilaan yang terdiri dari gelandangan dan pengemis serta tuna susila, selain disebabkan kemiskinan, juga diakibatkan oleh ketidakmampuan individu untuk hidup dan bekerja sesuai dengan nilai – nilai kemanusiaan. Masalah lainnya adalah rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial. Belum samanya persepsi pihak terkait, baik pemerintah, masyarakat dan organisasi sosial dan belum tertatanya sistem dan standar pelayanan minimal kesejahteraan sosial merupakan penyebab kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum sesuai dengan harapan.

Masalah lain adalah masih tingginya laju pertumbuhan penduduk yaitu 1,20%, masih tingginya tingkat kelahiran penduduk; kurangnya pengetahuan dan kesadaran pasangan usia subur dan remaja akan hal-hal reproduksi; masih rendahnya usia kawin pertama penduduk; rendahnya partisipasi laki-laki dalam ber KB; masih lemahnya ekonomi dan ketahanan keluarga; masih lemahnya institusi daerah dan pelaksanaan program KB, belum serasinya kebijakan kependudukan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan; belum tertatanya administrasi kependudukan dalam rangka membangun sistem pembangunan; pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan; rendahnya kualitas penduduk dan rendahnya budaya kerja yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kinerja pembangunan daerah.

2.1.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Dua indikator kinerja perekonomian daerah yang lazim dipakai adalah pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita. Kinerja

perekonomian daerah kabupaten Solok dalam 5 tahun terakhir telah memperlihatkan indikasi terjadinya pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini diperlihatkan oleh rerata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok periode 2000 – 2004 sebesar 4,63%. Besaran ini jauh melebihi rerata pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dalam periode yang sama (4,12%). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solok untuk 20 tahun ke depan diharapkan rata-rata 7% per tahun. Dengan besaran pertumbuhan ini diharapkan mampu menekan jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

Kontribusi sektoral terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Solok masih didominasi oleh sektor pertanian. Dalam periode 2000 – 2004, rerata kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 41,82%. Sektor industri dalam periode yang sama memberikan kontribusi terhadap PDRB hanya 7,36%. Kontribusi sektor lainnya yang relatif besar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Dalam periode yang sama rerata kontribusi sektor ini sebesar 14,12%. Pengangkutan dan komunikasi 9,13% dan jasa 15,22%.

Dilihat dari jumlah angkatan kerja yang diserap oleh setiap sektor ekonomi, ternyata pada tahun 2004 sebanyak 71,69% dari angkatan kerja bekerja di sektor pertanian. Sedangkan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB hanya 41,82%. Sektor Industri dengan jumlah angkatan kerja yang diserap sebanyak 2,43%, mampu memberikan kontribusi sebesar 7,36% dan jasa dengan kemampuan menyerap angkatan kerja hanya 8,55% mampu memberikan kontribusi sebesar 15,22%. Gambaran data ini mengindikasikan bahwa dalam periode 5 tahun terakhir ini, perekonomian Kabupaten Solok menghadapi ketimpangan produktivitas sektoral. Tantangan untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang adalah meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Solok dengan basis sektor

pertanian. Peningkatan kontribusi sektor industri harus dilakukan melalui pengembangan agroindustri.

Variabel investasi merupakan variabel strategis yang perlu dipacu pertumbuhannya sehingga dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi. Namun dalam 5 tahun terakhir (2000 – 2004) besaran jumlah investasi masih belum sesuai dengan harapan. Investasi yang dilakukan oleh pihak swasta baru 5,6% dari PDRB Kabupaten Solok. Karenanya, perlu diupayakan peningkatan investasi swasta menjadi 12% dari PDRB untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7%. Upaya percepatan pertumbuhan investasi sekaligus pertumbuhan ekonomi telah dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan daerah berupa peningkatan kualitas pelayanan publik seperti pelayanan satu pintu plus, kemudahan dalam pengurusan izin berusaha dan penciptaan keamanan dan ketertiban. Ke depan yang harus diupayakan secara maksimal adalah kebijakan daerah yang mengarah kepada penciptaan struktur investasi yang tepat sehingga para investor tertarik untuk melakukan investasi di Kabupaten Solok.

Pembangunan ekonomi Kabupaten Solok lebih difokuskan kepada kegiatan ekonomi rakyat yang berbasis sumberdaya lokal. Dalam jangka panjang diharapkan terciptanya kerangka pembangunan ekonomi yang mampu mengantarkan masyarakat ketingkat kesejahteraan yang tinggi. Saat ini aktivitas ekonomi masyarakat masih didominasi oleh kegiatan sektor pertanian yang masih tradisional sebagaimana ditunjukkan oleh : (1) sebagian besar petani mempunyai pengetahuan dan keterampilan terbatas dalam pengelolaan usaha tani yang berwawasan agribisnis, (2) kepemilikan lahan usaha tani sempit dan kecenderungan setiap tahun semakin berkurang, (3) kurangnya tenaga muda yang terdidik untuk memilih bekerja dibidang usaha pertanian, (4) lemahnya akses petani ke sumber modal sehingga mengalami kesulitan dalam pengembangan usaha pertaniannya, (5) lemahnya akses petani terhadap input produksi dan harga yang wajar,

(6) tidak adanya kepastian pasar dengan harga yang wajar, (7) fluktuasi harga yang mempengaruhi pendapatan petani, (8) masih lemahnya penanganan pasca panen dan tidak berkembangnya industri pengolahan dalam hal peningkatan nilai tambah, (9) semakin berkurangnya lahan produksi karena alih fungsi, (10) produktifitas lahan yang relatif terbatas karena keterbatasan penggunaan teknologi dan kemampuan tenaga kerja pertanian, (11) belum berkembangnya produk-produk agroindustri sebagai basis ekonomi rakyat. Permasalahan dalam penyediaan pangan yang menjadi bagian dari ketahanan pangan diantaranya menyangkut belum efisiennya proses produksi oleh petani, karena memiliki luas lahan garapan yang semakin menyempit (0,25-1 ha). Penanganan pasca panen yang belum optimal serta terbatasnya penggunaan sarana produksi, termasuk bibit unggul.

Koperasi dan UKM yang selama ini diharapkan sebagai wadah kegiatan ekonomi masyarakat sampai saat ini belum menunjukkan eksistensinya secara optimal. Pada keorganisasian koperasi masih ditemukan beberapa permasalahan diantaranya ; (1) rendahnya kemampuan dan terbatasnya jangkauan pemasaran, (2) rendahnya penguasaan teknologi serta masih kurangnya peran penelitian dalam pengembangan produksi, (3) rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan manajerial dari pengusaha, (4) kurang lengkapnya administrasi dan informasi akuntansi, (5) kecilnya modal usaha, baik modal kerja maupun modal tetap serta rendahnya aksesibilitas pada lembaga keuangan, (6) tingginya persaingan, (7) kemampuan jaringan bisnis masih terbatas serta beroperasi pada volume produksi sekitar titik impas sehingga akumulasi modal dari keuntungan kurang dapat diharapkan.

Untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah perlunya investasi baik publik maupun investasi privat, namun sampai saat ini arus

penanaman modal di Kabupaten Solok relatif masih rendah. Rendahnya penanaman modal disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu diantaranya belum tersedianya acuan yang jelas tentang pengaturan investasi di Kabupaten Solok. Harapan kedepan perlu ada peraturan daerah yang mengatur tentang investasi di Kabupaten Solok.

Di sisi lain lemahnya pengawasan dan penegakan hukum pengelolaan sumber daya kehutanan telah mendorong berbagai pihak untuk ikut memanfaatkan secara ilegal untuk kepentingan jangka pendek. Tindak kejahatan terhadap sumber daya kehutanan telah mengakibatkan *deforestasi* berlebihan yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat, daerah, bangsa dan negara. Tindak kejahatan terhadap sumber daya kehutanan yang marak akhir-akhir ini adalah pembalakan liar (*illegal logging*), dan penyeludupan kayu antardaerah (*illegal trading*). Terus merajalelanya permasalahan tersebut bermuara kepada lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dalam praktik pengelolaan sumber daya kehutanan yang tidak terlepas dari rendahnya kapabilitas dan konsistensi serta konsekuensi aparat penegak hukum serta tidak mencukupinya sarana dan prasarana penunjang tugas.

Kebijakan ekonomi yang cenderung lebih berpihak terhadap kegiatan eksploitasi Sumber Daya Alam. Kualitas sumber daya manusia juga dipengaruhi oleh kemampuan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berdampak tidak menyatunya kegiatan perlindungan fungsi lingkungan hidup dengan kegiatan pemanfaatan SDA sehingga sering melahirkan konflik kepentingan antara ekonomi sumber daya alam (pertambangan, kehutanan, pertanian, dan lain-lain) dengan lingkungan hidup.

Sementara itu, kualitas lingkungan juga terus mengalami degradasi yang ditunjukkan dengan meningkatnya pencemaran air dan tanah.

Umumnya pencemaran air dari kegiatan manusia disebabkan oleh kegiatan industri, rumah tangga, pertambangan dan pertanian. Penyebab pencemaran mutu tanah pada umumnya disebabkan oleh kegiatan pertanian yang masih dominan menggunakan pupuk anorganik dan sistem pengelolaan tanah yang tidak sesuai dengan elevasi dan sebagainya. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam sistem organisasi maupun program kerja pemerintah yang belum berjalan dengan baik. Degradasi hutan yang disebabkan kegiatan *Illegal logging* terus meningkat yang dapat menyebabkan daya dukung ekosistem terhadap pertanian dan pengairan semakin menurun dan mengakibatkan kekeringan dan banjir.

Tantangan pengembangan ekonomi masa depan menyangkut dengan semakin kuatnya persaingan dalam beberapa aspek ekonomi. Pertama persaingan untuk mendapatkan input dengan harga yang murah termasuk di dalamnya modal dan input produksi lainnya. Kedua persaingan untuk memasarkan produk. Kemampuan bersaing akan sangat menentukan keberhasilan ekonomi di masa datang, oleh karena itu perlu adanya upaya optimal bagi pemerintah daerah bersama masyarakat untuk dapat menciptakan daya saing daerah yang didukung oleh sumberdaya lokal (*comparative advantages*). Disisi lain kemajuan ekonomi yang tidak direncanakan secara matang cenderung berpotensi untuk merusak lingkungan karena pertumbuhan yang tinggi cenderung *trade-off* dengan kelestarian lingkungan.

2.1.4. Sosial Budaya dan politik

Budaya menyangkut dengan nilai-nilai yang diyakini dan mengatur kehidupan sekelompok masyarakat. Oleh karena itu pembangunan yang dilaksanakan harus mengakar kepada nilai-nilai budaya yang ada. Dengan

kata lain pembangunan harus berpadu dengan pengembangan budaya. Dalam pengembangan budaya masih ditemukan beberapa permasalahan yang dapat menghambat pengembangan budaya tersebut seperti: *Masih lemahnya peran mass media dalam mendorong pengembangan seni dan budaya daerah* Minangkabau sehingga menyebabkan semakin kurangnya pemahaman masyarakat terhadap seni dan budaya daerah; *Belum optimalnya pengembangan kreativitas dalam penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya daerah*, sehingga seni dan budaya daerah kurang diminati oleh masyarakat; *Belum sistematisnya pengenalan seni dan budaya daerah* dalam jenjang pendidikan maupun kehidupan masyarakat, serta rendahnya apresiasi yang diberikan bagi pekerja seni dan budaya.

Pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara masih memprihatinkan. Masih ditemukan perilaku negatif masyarakat seperti asusila, praktek KKN, penyalahgunaan narkoba dan perjudian serta perbuatan kriminal lainnya sering muncul kepermukaan. Permasalahan dalam pembangunan agama yaitu masih adanya keterbatasan peran pemuka adat, ulama, pemuka masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan iman dan ketaqwaan umat.

Di sisi lain masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, disamping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi perempuan dalam kehidupan sosial. Permasalahan mendasar lainnya adalah masih adanya kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari persoalan sosio kultural masyarakat. Dalam konteks sosial, kesenjangan ini mencerminkan masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang baik, pendidikan yang lebih tinggi dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang

lebih luas. Masalah lainnya adalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Perkembangan politik yang telah melalui tahap awal reformasi telah memberikan perubahan yang mendasar bagi demokratisasi di bidang politik dan ekonomi, serta implementasi desentralisasi di bidang pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan peranan kelembagaan sosial dan ekonomi nagari sangat penting, namun dalam prakteknya masih ditemukan beberapa kendala antara lain ; (1) banyaknya jumlah lembaga sosial dimasyarakat nagari sering menyebabkan terjadi perbenturan kegiatan, (2) dalam melaksanakan beberapa kegiatan sosial sering terjadinya tumpang tindih terutama untuk mendapatkan dana.

Kriminalitas belum tertangani secara optimal, hal ini merupakan ancaman nyata bagi terciptanya masyarakat yang aman, tentram dan damai. Situasi ini mengakibatkan berkurangnya kualitas pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Meningkatnya ancaman kejahatan lintas Kabupaten dan propinsi terhadap keamanan Kabupaten Solok seperti narkoba, perampokan dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor bahkan ancaman keselamatan di jalan raya menjadi sulit tertangani.

Bagi sebagian masyarakat, hukum dirasakan masih belum memberikan rasa keadilan, kesetaraan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya terhadap masyarakat kecil dan tidak mampu. Penegakan hukum dan kepastian hukum seringkali masih melihat status sosial seseorang. Pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi dan dilakukan oleh kelompok atau golongan, atau seseorang terhadap kelompok atau golongan, atau orang lainnya. Oleh karena itu sangat penting untuk melihat berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap warga sipil dan mencari pemecahan serta menyelesaikan berbagai masalah secara objektif dan adil sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran hukum yang berakibat pudarnya rasa aman ini secara mendasar juga disebabkan oleh turunnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum. Kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum merupakan prasyarat sekaligus tantangan dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, kondisi sosial, kesenjangan kesejahteraan, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, merupakan faktor korelatif kriminogen dan *police hazard* yang apabila hal ini tidak dibina dan dikelola secara baik dapat mendorong munculnya kejahatan dan konflik horizontal. Faktor ini hanya dapat diredam oleh sikap, perilaku dan tindakan masyarakat yang patuh dan disiplin terhadap hukum.

Di sisi lain globalisasi merupakan tantangan terhadap tatanan sosial budaya dan mobilitas masyarakat. Kemajuan teknologi di bidang informasi membuat suatu daerah hampir tidak mungkin untuk mengisolasi dirinya terhadap pengaruh budaya asing. Di sisi lain derasnya arus informasi dan tontonan yang datang dari luar yang tidak sesuai dengan nilai – nilai agama, adat dan budaya akan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat yang pada akhirnya memudarnya nilai-nilai budaya yang telah dimiliki.

2.1.5. Prasarana dan sarana

Sejak krisis ekonomi tahun 1997, kondisi pelayanan dan penyediaan infrastruktur yang meliputi transportasi, ketenagalistrikan, energi, pos, telekomunikasi, sumber daya air serta perumahan, pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan mengalami penurunan baik kuantitas maupun kualitasnya. Kesenjangan infrastruktur antar wilayah akan berdampak terhadap ketidakmerataan hasil pembangunan dan rendahnya investasi publik (infrastruktur dan kelembagaan) mengakibatkan ada wilayah yang

cepat pertumbuhannya dan ada yang terlambat seperti di wilayah nagari tertinggal. Ketertinggalan tingkat kemajuan beberapa wilayah nagari dan kecamatan disebabkan rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur di beberapa wilayah kecamatan dan nagari. Akibatnya, produktivitas usaha ekonomi rakyat di wilayah tersebut cenderung lebih rendah.

Di Kabupaten Solok prasarana jalan pada tahun 2004 sepanjang 175,83 km dan jalan sedang 260,15 km serta jalan yang rusak berat 520,78 km. Dengan rincian jalan kelas IV sepanjang 1.228,11 dan jalan yang kelas tidak terperinci 15,35 km. Dengan terbatas prasarana jalan berakibat terhadap masih adanya lokasi jorong pada suatu nagari yang masih terisolasi.

Prasarana pos dan giro telah membantu terjadi arus kas masuk (*cash inflow*) ke Kabupaten Solok pada tahun 2004 jumlah wesel yang dikirim sebanyak 6017 dan dibayar sebanyak 31.601 pada kantor Pos dan Giro. Disamping itu banyak satuan sambungan telepon di Kabupaten Solok sampai tahun 2004 sebanyak 8.753 sambungan serta daftar tunggu sebanyak 425, sedangkan kapasitas saluran sebanyak 8.344 jaringan.

Masyarakat maju ditandai dengan semakin tingginya mobilitas dan aksesibilitas penduduk. Di sisi lain hal tersebut menuntut ketersediaan prasarana pembangunan sebagai sumber akses bagi masyarakat. Prasaranan tersebut antara lain jalan raya, telepon, air bersih, kesehatan dan pendidikan. Hal ini bagi masyarakat maju termasuk ke dalam indikator kebutuhan dasar manusia.

2.1.6. Pemerintahan

Fungsi utama pemerintah daerah adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat. Untuk terlaksananya pelayanan tersebut diperlukan profesionalisme aparatur berdasarkan prinsip tatakelola pemerintah yang

baik. Namun dalam prakteknya masih dirasakan rendahnya kualitas pelayanan publik, sebagaimana ditunjukkan masih tingginya ketidakpuasan dan rendahnya partisipasi masyarakat. Selanjutnya lemahnya partisipasi masyarakat dalam setiap perumusan dan pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu penyebab kegagalan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan daerah. Berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat selama ini hasilnya belum menunjukkan peningkatan yang signifikan sebagai akibat lemahnya partisipasi masyarakat.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan serta pengawasan kebijakan juga disebabkan oleh kurangnya informasi dari lembaga pemerintah yang pada gilirannya akan menyebabkan rendahnya kinerja dan kredibilitas pemerintah daerah. Rendahnya kualitas pelayanan aparatur tersebut disebabkan oleh tingginya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, rendahnya kinerja sumber daya aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan manajemen pemerintahan dan rendahnya kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Banyaknya permasalahan mendasar tersebut menyebabkan rendahnya kredibilitas lembaga pemerintah dimata masyarakat di sisi lain penanganan yang tidak sistemik terhadap permasalahan mendasar tersebut sering melahirkan persoalan baru terhadap kelembagaan pemerintah. Di masa datang sikap kritis dan tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas masyarakat cenderung semakin meningkat seiring dengan meningkatkat kualitas sumberdaya manusia dan iklim keterbukaan.

2.1.7. Sektor Pariwisata

2.1.7.1 Permasalahan dan Tantangan

Berdasarkan kondisi geografis yang dimiliki Kabupaten Solok, maka sektor pariwisata merupakan sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan. pengembangannya harus ditunjang oleh pengelolaan sumberdaya alam dan ketersediaan infrastruktur jalan, telekomunikasi dan hotel. Pengembangan sektor ini secara konstruktif dan terencana akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Dari tahun 2001 sampai 2004 jumlah kunjungan wisatawan domestik menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan (rerata 3,40%), namun wisatawan mancanegara mengalami penurunan sebesar rerata 30,71%.

Namun demikian saat ini masih ditemukan beberapa permasalahan antara lain; (1) Belum adanya rencana induk pengembangan wisata yang terintegrasi dengan daerah-daerah lain di Sumatera Barat, (2) Masih belum terkelolanya secara baik dan profesional objek wisata yang ada, (3) Sadar wisata belum terwujud karena sosialisasi belum berjalan dengan baik, (4) Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dan pelaku wisata terhadap manfaat industri pariwisata, (5) Lemahnya pelayanan transportasi dan akomodasi, (6) Lemahnya institusi pariwisata khususnya menyangkut sumber daya manusia seperti pemandu wisata, (7) Kurangnya promosi dan jaringan informasi pariwisata, (8) Kurangnya minat investor dibidang pariwisata.

Kedepan tuntutan terhadap kualitas pariwisata akan semakin meningkat karena semakin terbukanya akses ke berbagai penjuru tanah air dengan semakin lancarnya transportasi udara.

BAB III

VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi

Berdasarkan kondisi masyarakat dan modal dasar Kabupaten Solok saat ini, serta tantangan yang dihadapi dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, maka Visi Pembangunan Daerah Tahun 2006-2025 adalah *"KAMI BERTEKAD MENJADI KABUPATEN TERBAIK DARI YANG BAIK"* Dengan komitmen masyarakat bangga pada usaha dan daerahnya, bertaqwa, berakhlak, berbudi luhur dan berdisiplin, dan masyarakat perantau bangga pada kampung halamannya serta aparatur bangga dalam pengabdianya.

Visi Pembangunan Daerah tahun 2006-2025 tersebut harus dapat diukur dengan menciptakan kehidupan perekonomian masyarakat yang lebih baik, penataan masyarakat Kabupaten Solok yang lebih baik, penyelenggaraan pemerintahan yang ideal serta bentuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang lebih baik.

Ditinjau dari tingkat perkembangan kehidupan ekonomi, kemajuan suatu daerah dapat diukur dari tingkat kemakmuran masyarakat yang tercermin dari tingkat pendapatan dan distribusi tingkat pendapatan yang lebih tinggi.

Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan pembangunan makin meningkat, baik dilihat dari segi sumbangannya dalam penciptaan pendapatan daerah maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu dalam proses produksi berkembangnya keterpaduan antarsektor, terutama sektor industri, sektor pertanian dan sektor jasa-jasa serta pemanfaatan sumber alam secara rasional, efisien dan

berwawasan lingkungan. Lembaga dan pranata ekonominya telah tertata, dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktifitas yang tinggi.

Selain diukur berdasarkan indikator ekonomi, tingkat kemajuan suatu daerah juga diukur berdasarkan berbagai indikator sosial yang pada umumnya berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya. Suatu daerah dikatakan makin maju apabila makin tinggi tingkat pendidikan penduduknya. Hal itu tercermin pada tingkat pendidikan terendah serta tingkat partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistim pendidikan.

Kemajuan suatu daerah juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, termasuk derajat kesehatan. Ada kaitan erat antara kemajuan suatu daerah dengan laju pertumbuhan penduduk. Daerah yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas SDM yang makin baik akan tercermin dalam produktifitas yang makin tinggi.

Kemajuan suatu daerah juga tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan sosial masyarakat. Sikap dan mental masyarakat yang baik adalah cerminan budaya dalam arti seluas-luasnya. Sikap ini harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Di Kabupaten Solok masyarakat mempunyai hak, baik dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sehingga seluruh komponen masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari masyarakat, oleh masyarakat dan

untuk masyarakat. Oleh karena itu masalah keikutsertaan masyarakat merupakan ciri yang menonjol pula dalam daerah.

Semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak politiknya. Dengan demikian, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun baik antar individu, gender, dan antar nagari.

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan harus didukung oleh sistem, kelembagaan dan aparatur yang baik. Untuk mencapai pembangunan daerah yang akan mewujudkan masyarakat adil dan makmur sistem pemerintahan harus berjalan dengan efisien dan efektif. Lembaga-lembaga pemerintah daerah merupakan pengejawantahan dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sementara itu aparatur pemerintah yang profesional dengan dedikasi yang tinggi merupakan modal dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

Daerah yang maju ditandai oleh peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia serta dalam kehidupan politik. Daerah yang maju pada umumnya adalah daerah yang masyarakatnya sadar akan hak dan kewajibannya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka sangat disiplin dan menghargai hak orang lain disamping mengetahui hak dan kewajibannya sendiri. Demokratisasi sudah berjalan sesuai dengan budaya dan latar belakang sejarahnya. Artinya daerah yang maju adalah daerah yang warga masyarakatnya terjamin hak-haknya, yang terjamin rasa keamanan dan ketentraman dalam kehidupannya.

Kemajuan suatu daerah tercermin antara lain pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan pembangunan infrastruktur yang akan mendukung aktifitas perekonomian masyarakat. Pembiayaan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari kemampuan sendiri menjadi tolak ukur dalam peningkatan perekonomian daerah.

Pembangunan infrastruktur yang mengedepankan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup juga menjadi ciri suatu daerah yang maju. Sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber daya yang sangat sulit untuk diperbaharui memerlukan strategi dan antisipasi dini agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dalam jangka waktu yang lama.

3.2. Misi

Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan keinginan pada akhir periode perencanaan Pembangunan Kabupaten Solok diwujudkan melalui misi sebagai berikut:

3.2.1. Mewujudkan kehidupan ekonomi masyarakat yang mandiri serta didorong oleh pemerintah daerah adalah memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan dan potensi masing-masing Nagari menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan ditingkat lokal. Produktifitas yang tinggi didukung oleh kualitas dan pemasaran yang berkelanjutan akan memacu gairah masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

3.2.2. Mewujudkan Penataan Masyarakat Yang Mampu Menyelaraskan Kehidupannya dengan arus modernisasi dan globalisasi adalah meningkatkan pembangunan pelayanan

hak-hak dasar masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan nagari yang masih tertinggal, menanggulangi kemiskinan secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

3.2.3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Antisipatif, Fasilitatif, Profesional dan Proporsional, Transparansi dan Akuntabel adalah meningkatkan kemampuan dan kompetensi aparatur pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya, penataan kelembagaan pemerintah yang efektif dan efisien untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan yang mengedepankan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan proporsi masing-masing sektor pembangunan, Meningkatkan kepatuhan aparat dan masyarakat terhadap hukum serta memelihara kerukunan dan ketertiban bermasyarakat.

3.2.4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana adalah meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung aktifitas perekonomian, pembangunan infrastruktur publik dan infrastruktur sosial dengan memperhatikan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

3.3. Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Solok

Arah pembangunan Daerah Kabupaten Solok merupakan strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah. Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025 adalah mewujudkan Kabupaten Solok sebagai Kabupaten Yang Terbaik dari yang baik sebagai

landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat yang adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai ukuran tercapainya Kabupaten Solok menjadi Kabupaten terbaik dari yang baik, pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan kepada sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

3.3.1. Terwujudnya kehidupan ekonomi masyarakat yang mandiri serta didorong oleh pemerintah daerah, yang ditunjukkan oleh :

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita tahun 2025 mencapai Rp. 12.747.390,-
2. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif diberbagai nagari Kabupaten Solok. Sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata, industri kecil, usaha kecil, mikro dan menengah serta pertambangan menjadi basis aktifitas ekonomi yang dikelola secara efisien dan menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang bersaing global, industri pariwisata menjadi motor penggerak perekonomian serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan bermutu dan berdaya saing.
3. Tercapainya pertumbuhan investasi yang mampu mendukung tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), menciptakan berbagai lapangan kerja dan usaha serta menurunkan tingkat pengangguran.

Terwujudnya Penataan Masyarakat Yang Mampu Menyelaraskan Kehidupan dengan arus modernisasi dan globalisasi, yang ditunjukkan oleh :

1. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga
2. Tercapainya kualitas sumber daya manusia yang semakin meningkat, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas SDM ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan gender, serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
3. Menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 6,9 % dan Jumlah penyandang masalah sosial
4. Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan watak dan prilaku manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
5. Makin mantapnya budaya masyarakat yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat dan martabat manusia Kabupaten Solok dan memperkuat jati diri dan kepribadian sebagai orang minang.

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, Antisipatif, Fasilitatif, Profesional dan Proporsional, Transparan dan Akuntabel, yang ditunjukkan oleh :

1. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, santun dan tegas, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta profesional, yang mampu mendukung pembangunan daerah.

2. Terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM yang bersumber pada Pancasila, UUD 1945 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya serta tertatanya sistem hukum adat yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif.
3. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan penyelenggaraan pemerintahan yang selalu bersendikan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri serta adanya kemandirian daerah.

Terwujudnya Sarana dan Prasarana yang ditunjukkan oleh :

1. Tercapainya pembangunan yang semakin merata keseluruhan nagari. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat diseluruh nagari, termasuk berkurangnya kesenjangan antar nagari dan kecamatan.
2. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi nagari dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan moderen guna terciptanya masyarakat informasi Kabupaten Solok.
3. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien dan akuntabel serta terwujudnya Daerah tanpa permukiman kumuh.

4. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi dan daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari.
5. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah dan daya saing daerah, serta modal pembangunan daerah.
6. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025 merupakan masa depan Kabupaten Solok yang bergantung kepada tiga faktor penting yaitu tersedia sumberdaya yang memadai, para pelaku pembangunan yang dapat diandalkan, mekanisme pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya.

Oleh sebab itu kebijakan pembangunan harus diarahkan kepada keterpaduan, keseimbangan dan berkelanjutan melalui strategi dan prioritas pembangunan daerah yang relevan. Keadilan sosial merupakan gambaran ideal dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Solok. Justru itu hasil pembangunan harus diarahkan kepada pencapaian tujuan yang diupayakan melalui pola aliansi kemitraan. Hasil yang diharapkan adalah citra pemerintah yang baik (government image) dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah tahun 2006-2025 yang berisi visi, misi dan arah pembangunan daerah, merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat didalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 tahun kedepan.

RPJP Daerah ini juga menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Lima Tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan tekad Kabupaten Solok menjadi Kabupaten Terbaik Dari Yang Baik, perlu didukung oleh :

1. Komitmen dari para pemimpin daerah yang kuat dan demokratis
2. Konsistensi kebijakan pemerintah daerah
3. Keberpihakan kepada rakyat
4. Peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif

BUPATI SOLOK

Dto

GUSMAL